

Kerusuhan Rasial di Kabupaten Brebes pada Tahun 1998

Ratna Bella Sari ✉ & Wasino

Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima November 2021

Disetujui Desember 2021

Dipublikasikan Januari 2022

Keywords:

Kerusuhan, Reformasi,
Brebes

Abstrak

Indonesia merupakan negara majemuk dan kemajemukannya tersebut sudah diwariskan ke beberapa generasi. Warisan kemajemukan yang sudah ada sejak lama tersebut, tentu saja memiliki berbagai tantangan dan tidak begitu saja selamanya dapat dikatakan harmonis. Berbagai konflik dan sentimen masa lalu juga mendorong sehingga menjadi sebuah stimulus mengapa konflik dapat terjadi. Konflik yang seringkali muncul di Indonesia adalah konflik antara etnis Tionghoa dengan etnis Jawa. Gambaran tentang adanya konflik tersebut, terjadi di Kabupaten Brebes pada 13 Februari 1998. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah, tulisan ini mengungkap peristiwa yang mengatakan bahwa Etnis Tionghoa di Brebes menjadi sasaran amukan massa yang sudah mengalami puncak krisis akibat adanya permasalahan ekonomi, faktor kemarau panjang di Brebes dan puncaknya adalah menjadikan etnis Tionghoa di Brebes sebagai sasaran dari amukan massa. Di samping itu, sumber yang digunakan dalam tulisan ini adalah sumber arsip koran, kesaksian warga Losari Timur, kesaksian korban yang merupakan etnis Tionghoa, aparat pemerintah dan keamanan.

Abstract

Indonesia is a pluralistic country and this diversity has been passed down to several generations. The legacy of pluralism that has existed for a long time has various challenges and cannot be said to be harmonious forever. Various conflicts and past sentiments also encourage so that they become a stimulus for why conflicts can occur. The conflict that often arises in Indonesia is the conflict between the Chinese and the Javanese. The description of the existence of the conflict occurred in Brebes Regency on February 13, 1998. Using historical research methods, this paper reveals the incident that said that the Chinese in Brebes became the target of mass tantrums that had already experienced the peak of the crisis due to economic problems, the long drought in Brebes, and the culmination was to make the Chinese in Brebes the target of mass outrage. In addition, the sources used in this paper are newspaper archives, testimonies from East Losari residents, testimonies of victims who are ethnic Chinese, government and security officials.

© 2021 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Ruang Jurnal Sejarah, Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: ratna.bella@students.unnes.ac.id

ISSN 2252-6633

PENDAHULUAN

Warisan kemajemukan yang sudah ada sejak lama tersebut tentu saja memiliki berbagai tantangan dan tidak begitu saja selamanya dapat dikatakan harmonis. Berbagai konflik dan sentimen masa lalu juga memberikan dampak sehingga menjadi sebuah stimulus mengapa konflik dapat terjadi. Konflik tidak muncul begitu saja dengan sendirinya, melainkan ada faktor-faktor yang melatar belakangnya. Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda, seperti konflik antar individu (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antar kelompok dengan negara (*vertical conflict*) dan konflik antar negara (*interstate conflict*). Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya masing-masing. Konflik sendiri hadir sebagai manifestasi dari ketegangan sosial, politik, ekonomi dan budaya atau bisa juga disebabkan oleh perasaan ketidakpuasan umum, ketidakpuasan terhadap komunikasi, ketidakpuasan terhadap simbol-simbol sosial (Irwandi dan Chotim, 2017: 25). Konflik juga diakibatkan oleh perbedaan kepentingan antara satu individu dengan individu lain atau antara individu dengan kelompok atau bahkan antara kelompok dengan kelompok (Soekanto, 2006: 280). Hal tersebut juga akan berlanjut terhadap persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat tercapai secara simultan (Sahlan, 2015: 10).

Konflik yang seringkali muncul di Indonesia adalah konflik antara etnis Tionghoa dengan etnis Jawa. Setidaknya terdapat tiga wacana yang sudah mengakar sejak lama terhadap etnis Tionghoa seperti mereka dianggap sebagai orang-orang pendatang dan bukan asli dari Indonesia, sikap tertutup dan eksklusif dari orang Tionghoa, dan bidang ekonomi yang membuat mereka berada dalam lapisan atas (Alfarabi, 2010: 55). Fakta masa lalu tersebut yang kelak akan menimbulkan wacana dan stigma terhadap orang Tionghoa di Indonesia seperti adanya perlakuan yang berbeda antara orang Jawa dan Orang Tionghoa membuat

adanya rasa kecemburuan yang berujung adanya konflik. Orang Tionghoa seringkali mendapatkan perlakuan istimewa ketika mendapatkan kedudukan sebagai penjaga pelabuhan, pemungut pajak, hingga penjaga pos perbatasan membuat mereka dianggap sebagai pemerias (Dahana, 2014: 56).

Maraknya kerusuhan di Losari Timur Brebes tersebut merupakan buntut dari adanya kerusuhan yang bermula dari wilayah Subang hingga Cirebon. Dua wilayah tersebut sudah dipastikan menjadi asal mula massa yang bergerak hingga ke Losari Timur Brebes. Seperti wilayah Losari Barat Cirebon ketika pada 12 Februari 1998 sudah mengalami kerusakan parah akibat massa yang mengamuk dan merusak pertokoan. Tentu saja peristiwa tersebut dapat dipastikan mampu memicu wilayah lain untuk tersulut melakukan kerusuhan yang sama karena permasalahan ekonomi, kemarau, dan sentimen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat provokasi-provokasi yang nantinya juga akan memancing warga Kabupaten Brebes untuk juga ikut melakukan kekerasan (Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, 2012: 196).

Keberadaan etnis minoritas seperti etnis Tionghoa tersebut menjadi sasaran dari amukan massa yang melakukan kekerasan. Berbagai jenis toko yang menjajakan dagangan juga tidak luput dari amukan massa tersebut. Akibat dari kekerasan tersebut juga membuat Kabupaten Brebes yang merupakan daerah yang dilalui jalur pantura mengalami kemacetan yang panjang hingga membuat aktivitas lalu lintas terganggu. Selain masalah lalu lintas, masalah di Losari juga sangat berpotensi menyebar ke wilayah Tegal, Pemalang, dan Pekalongan.

Kerusuhan yang mengalami kerusakan parah di Cirebon, dari segi pola kerusuhan dan penanganan tidak seperti di Losari Timur Brebes. Dalam tulisan ini, penulis menemukan bahwa proses terjadinya kerusuhan hingga penanganan dapat diketahui berdasarkan kesaksian dari korban dan masyarakat Brebes. Dengan demikian,, dalam tulisan ini akan disajikan bagaimana cepatnya penanganan sebagai akibat dari kerusuhan yang terjadi. Seperti penanganan kemacetan dan upaya bersama dari masyarakat,

aparatus, dan pemerintah agar kerusuhan tidak semakin menyebar.

Dalam penulisan ini, penulis memiliki pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana konflik rasial di Kabupaten Brebes pada tahun 1998 dapat cepat diatasi dan tidak terjadi dalam skala yang besar. Berdasarkan permasalahan tersebut akan dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana permasalahan ekonomi, alam, dan sentimen dapat memicu konflik rasial di Kabupaten Brebes. 2) Bagaimana proses kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Brebes. 3) Bagaimana upaya penanganan konflik rasial di Kabupaten Brebes oleh aparat daerah maupun masyarakat..

METODE

Dari permasalahan yang di bahas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Menurut Dudung Abdurrahman, yang dimaksud metode sejarah adalah cara, jalan, dan petunjuk teknis dalam mengungkapkan peristiwa di masa lalu (Abdurrahman, 1999: 43). Senada dengan Abdurrahman, Gottschalk juga menyatakan metode penelitian adalah bagaimana proses menguji dan cara menganalisis secara kritis rekaman dari pengalaman masa lampau (Gottschalk, 2008: 32). Metode sejarah sendiri terdiri dari empat tahap yang saling erat berkaitan antara satu dengan yang lainnya yakni; heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan langkah historiografi.

Dalam melakukan heuristik, penulis pada mulanya memiliki relasi dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Brebes ketika penulis sedang melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di instansi tersebut. Seiring berjalannya waktu, penulis menemukan banyak kesaksian dan sumber selama melakukan kegiatan tersebut yang terkhusus mengenai masalah konflik rasial yang pernah terjadi di Kabupaten Brebes pada tahun 1998. Jalan untuk menemukan sumber dengan mudah ditemukan oleh penulis, sehingga dengan cepat penulis langsung melakukan wawancara dengan mantan Bupati Brebes yaitu Bapak H. Syamsudin

Sagiman yang bersedia memberikan informasi kepada penulis mengenai kejadian konflik rasial di Kabupaten Brebes pada tahun 1998. Kemudian, wawancara juga dilakukan dengan sejarawan Kabupaten Brebes yaitu Bapak Wijanarto, M.Hum. Terlebih lagi, penulis mendapatkan informan yang merupakan etnis Tionghoa bernama Bapak Sugiton yang merupakan pengurus klenteng Brebes dan pedagang yang bernama Ibu Taci Nina. Tokoh masyarakat Losari juga bersedia menjadi informan dalam penulisan kali ini yaitu Bapak Wasnadi.

Selain melakukan wawancara, penulis mengumpulkan surat kabar sezaman yang memberitakan kejadian konflik rasial di Kabupaten Brebes pada tahun 1998. Penulis dapat dengan mudah menemukan arsip koran tersebut di Kantor Arsip Jawa Tengah yang menyediakan beberapa surat kabar. Surat kabar yang penulis temukan adalah Surat kabar Wawasan. Selain itu, penulis menemukan surat kabar lain yang memberitakan peristiwa tersebut adalah Suara Merdeka yang dapat mudah ditemukan di Depo Arsip Suara Merdeka.

Pada tahap verifikasi, dalam hal ini data yang diperoleh harus diuji, baik secara intern maupun ekstern. Data yang diperoleh melalui wawancara, arsip, dan buku bacaan harus dilakukan kritik ekstern dan intern sehingga dapat mudah dilakukan perbandingan mengenai satu sumber dengan sumber yang lain.

Langkah selanjutnya yakni interpretasi dalam penelitian sejarah, yakni sebuah usaha yang merupakan penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari data-data yang telah diseleksi dan telah dilakukan kritik sumber. Fakta yang ada diperoleh dari wawancara, arsip dan sebagian besar koran maupun majalah kemudian diseleksi dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan konflik rasial di Kabupaten Brebes pada tahun 1998. Pada tahap ini, penulis tidak dapat memasukkan semua data-data yang diperoleh ke dalam tulisan dan tentu saja untuk menghindari subjektivitas dalam penulisan sejarah. Penulis sudah menempatkan diri dalam posisi objektif agar tidak terkesan penulisan sejarah dalam tulisan ini bersifat memihak. Topik

penulisan mengenai sejarah konflik rasial di Kabupaten Brebes pada tahun 1998 adalah murni untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari kejadian serupa di kemudian hari.

Historiografi merupakan penulisan sejarah dengan merangkai fakta-fakta menjadi kisah sejarah berdasarkan data-data yang sudah dianalisa. Di sinilah pemahaman dan interpretasi atas fakta sejarah disusun secara kronologis dalam bentuk kisah sejarah yang menarik dan logis sehingga menghasilkan tulisan sejarah yang berjudul “Konflik Rasial pada Tahun 1998 di Kabupaten Brebes”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Ekonomi, Kemarau Panjang, dan Sentimen dalam Puncak Masa Krisis 1998.

Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter. Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan baru untuk mengatasi krisis moneter tersebut melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah melalui *Letter of Intent* yang merupakan dana bantuan dari IMF pada 15 Januari 1998 (Sumarto, 2019: 18). Dari hasil temuan dari Lembaga Peneliti SMERU, menunjukkan bahwa dampak dari kebijakan tersebut adalah perdagangan semakin bebas dan rata-rata keuntungan dari pedagang menurun sebesar 60%-89% (Sumarto, 2019: 18). Pemerintah juga menerapkan kebijakan membentuk badan yang menampung berbagai jenis komoditas yang justru lebih menguntungkan kalangan tertentu dibandingkan rakyat. Permasalahan tersebut menjadi isu nasional bahwa pada masa Orde Baru menunjukkan adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam tubuh pemerintahan. Data yang telah dihimpun sejak tahun 1999 menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan Indonesia jauh di bawah negara-negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Kinerja pemerintahan tersebut memiliki aspek tingkat peradilan dan korupsi (Ismansyah dan Sulisty, 2010: 47).

Kebijakan dan kinerja pemerintah Indonesia dalam skala nasional tersebut sangat berdampak terhadap kondisi negara. Hal tersebut juga merembet hingga ke daerah-daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Brebes. Permasalahan tersebut mencakup naiknya harga-harga barang dan langkanya kebutuhan pokok sehari-hari bagi warga Brebes. Naiknya harga-harga barang tersebut seperti contoh, naiknya harga pakan untuk udang windu yang semula Rp. 3.800/kg menjadi Rp. 10.000/kg, harga minyak goreng yang semula Rp. 3.000/liter menjadi Rp. 5.500/liter, harga pakan ayam yang semula Rp. 40.000/sak langsung melejit naik hingga Rp. 96.000/sak, dan harga beras yang semula Rp. 950/kg menjadi Rp. 2.500/kg (*Bahari* pada 8 Februari 1998: 1). Melambungnya harga-harga di Kabupaten yang ditemukan di berbagai sumber menunjukkan adanya ketidakpuasan dari masyarakat. Ketidakpuasan tersebut kelak akan menimbulkan permasalahan yang berujung pada kemarahan-kemarahan massa yang tidak puas akan kondisi demikian.

Selain karena buruknya kebijakan moneter yang berakibat pada melambungnya harga. Kabupaten Brebes juga mengalami kekeringan panjang yang mengakibatkan penurunan produksi pertanian (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2012: 194). Kemarau tersebut sangat mempengaruhi tingkat produksi sektor pangan di Kabupaten Brebes. Data yang ditemukan pada tahun 1996, produksi padi di Brebes mencapai 507.634 ton dan angka tersebut turun menjadi 474.627 ton pada tahun 1997 sesuai kondisi kemarau panjang di Indonesia yang dimulai pada tahun 1997 (Badan Pusat Statistik Brebes, 1999: 127). Penurunan produksi padi yang terjadi di Brebes dan daerah lain, membuat Indonesia mengalami krisis beras dan juga kenaikan yang signifikan dengan harga beras yang semula Rp. 950/kg menjadi Rp. 2.500/kg. Kondisi tersebut, membuat Indonesia harus mengimpor beras sebesar 5,8 juta ton pada tahun 1998 sebagai dampak dari bencana kemarau yang melanda Indonesia (Irawan, 2003: 36). Harga kebutuhan pokok yang naik tersebut membuat masyarakat kesulitan karena naiknya kebutuhan pokok dan menjadi penyebab mulai terjadinya sentimen

etnis yang sekaligus menjadi bukti konkrit sebagai dampak dari kenaikan harga kebutuhan pokok.

Dari segi kependudukan yang menyebabkan sentimen etnis, Badan Pusat Statistik tidak melakukan pendataan penduduk Tionghoa di Brebes, namun hanya menyajikan data berupa data pemeluk agama yang ada di Kabupaten Brebes. Pemeluk agama di Kabupaten Brebes pada tahun 1998 dapat dirinci yang diantaranya adalah penduduk beragama Islam berjumlah 1.568.889 jiwa, Katolik berjumlah 2.049 jiwa, Protestan berjumlah 1.634 jiwa, Hindu berjumlah 326 jiwa, dan Budha berjumlah 274 jiwa (Badan Pusat Statistik Brebes, 1999: 111).

Dalam kasus ini, masyarakat Kabupaten Brebes yang terkhusus digolongkan sebagai orang Jawa, memiliki sentimen yang sejak lama sudah melekat dalam diri mereka terhadap orang-orang yang beretnis Cina. Pada bagian sebelumnya, dijelaskan bahwa tidak ada data terperinci mengenai jumlah penduduk Kabupaten Brebes dari segi etnis. Namun, jika ingin melihat dari segi jumlah, dapat dilihat berdasarkan jumlah pemeluk agama yang ada karena orang-orang Cina sendiri lebih banyak memeluk agama Katolik dan Budha (Husodo, 1985: 61). Anggapan tersebut tidak dapat menjadi pembenaran bahwa orang-orang Cina dapat digolongkan sebagai pemeluk agama Katolik dan Budha, melainkan juga ada yang beragama Islam. Jika kita mengendarai kendaraan dari Anyer hingga ke Banyuwangi, maka kita akan seringkali menemukan toko-toko milik orang Cina di sepanjang jalan kota (Husodo, 1985: 61). Sentimen itu selalu didasari bahwa orang-orang Cina tidak dapat berbaur dengan penduduk setempat dan selalu memisahkan diri. Sikap yang eksklusif tersebut dapat menjadi alasan ketika timbulnya gejolak sosial, politik, dan ekonomi, maka orang-orang Cina ini selalu menjadi sasaran dari kemarahan penduduk Bumiputera. Dalam bagian selanjutnya, tentu saja etnis Cina di Brebes tidak lepas dari kemarahan dari penduduk Brebes setempat yang merasa marah karena krisis yang terjadi. Secara spesifik dapat digambarkan bahwa terjadinya sentimen antara

etnis Tionghoa dan penduduk Brebes terjadi pada rentang waktu bulan Februari ketika naiknya kebutuhan pokok (Husodo, 1985: 61).

Awal Mula Terjadinya Konflik di Losari Timur Tahun 1998

Kerusuhan yang terjadi di Brebes bermula dari Bandung dan Majalengka, kerusuhan sudah benar-benar terjadi pada Kamis, 12 Februari 1998 (*Suara Merdeka*, 14 Februari 1998: 16). Kerusuhan yang terjadi di Majalengka dan Bandung tersebut menjadi pemicu massa di wilayah lain untuk bergerak melakukan hal yang sama. Kondisi tersebut benar-benar terjadi ketika wilayah Subang dan Cirebon terjadi kerusuhan serta penjarahan yang dilakukan terhadap toko-toko yang berada di wilayah tersebut pada 13 Februari 1998 (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2012: 195).

Terkhusus untuk wilayah Cirebon, terdapat sebuah wilayah yang disebut sebagai Losari Barat yang merupakan Jalur Pantura yang menghubungkan wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Wilayah yang disebut Losari Barat tersebut sudah terjadi perkumpulan massa yang melakukan demonstrasi yang menghambat jalur lalu lintas Pantura sejak pukul 09.00 (Wawancara dengan Diding). Pada mulanya, tidak ada tindakan kerusuhan sama sekali. Hal tersebut berdasarkan kesaksian warga Losari yang melihat banyaknya massa yang berkumpul hanya mengatakan untuk menurunkan harga-harga dengan nada yang meninggi. Namun, keadaan tersebut berubah ketika segerombolan provokator datang dengan mengendarai truk sambil meneriakkan suara yang lantang “Bakar! Bakar!” (Wawancara dengan Sugithon pada 13 Desember 2020).

Terjadinya Kerusuhan di Losari Timur Tahun 1998

Kerusuhan di Losari Barat, Cirebon, tersebut sementara berakhir ketika memasuki pukul 11.00. Di waktu tersebut, massa yang bubar dikarenakan akan melaksanakan Ibadah Sholat Jumat (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2012: 196). Setelah ibadah Sholat Jumat tersebut, massa yang berjumlah ribuan tersebut langsung bergerak ke arah timur menuju Losari Timur,

Brebes. Lokasi Losari Barat (Cirebon) dan Losari Timur (Brebes) hanya dibatasi oleh Jembatan Cisanggarung yang membuat mudahnya massa yang bergerak akan sangat mudah menuju ke arah timur.

Gelombang massa yang jumlahnya ribuan tersebut perlahan sudah membubarkan diri ketika waktu sudah menunjukkan pukul 11.00 yang mengharuskan mereka membubarkan diri untuk melaksanakan Ibadah Sholat Jumat. Penduduk yang berada di Losari Timur tetap memiliki rasa khawatir akan terjadi pembakaran lanjutan dan pembakaran terhadap toko-toko mereka. Terlebih, lokasi antara Losari Barat (Cirebon) dan Losari Timur (Brebes) hanya dibatasi oleh Jembatan Cisanggarung.

Beranjak dari massa yang mengamuk akan naiknya harga-harga barang dan kebutuhan pokok, penduduk Etnis Tionghoa di Brebes sendiri pada malam hari tanggal 12 Februari 1998 sudah mendengar kabar bahwa akan ada pergerakan massa untuk sekadar berdemo yang menginginkan turunnya harga. Kondisi seperti di Bandung, Majalengka, dan Subang yang sudah terjadi kerusuhan di hari sebelumnya tetap membuat penduduk Tionghoa yang tinggal di Losari Timur tetap merasa khawatir (Wawancara dengan Nani Hendrawati pada 13 Desember 2020).

Penduduk Tionghoa yang berada di Losari Timur pada 12 Februari 1998 sudah berkumpul dan membicarakan kepada sesama pengusaha pertokoan untuk meminta bantuan kepada Brimob agar mau melindungi pertokoan mereka yang dikhawatirkan massa yang awalnya berdemo akan berujung anarkis.

Hal yang ditakutkan oleh penduduk Tionghoa Losari Timur benar adanya bahwa massa yang datangnya dari Losari Barat sudah benar-benar anarkis dengan membakar, menjarah, namun tidak ada kekerasan. Kepulan asap yang sudah terlihat di udara membuat penduduk Losari Timur segera menutup toko-toko mereka sejak pagi hari pukul 09.00. Kondisi bubarnya massa karena ibadah Sholat Jumat tidak memberi arti bahwa kerusuhan dan penjarahan akan berakhir.

Massa yang bergerak dari arah Losari Barat, berbondong-bondong menuju ke arah timur pasca Ibadah Sholat Jumat. Losari Timur tentu saja diambang kerusakan dan kerugian yang besar layaknya Losari Barat. Massa yang awalnya berdemo untuk meminta menurunkan harga dengan teriakan-teriakan kemarahan dan ditambah kehadiran provokator, menjadikan penduduk Tionghoa di Cirebon dan Brebes menjadi kambing hitam atas naiknya harga-harga kebutuhan pokok akibat krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Massa yang sudah mulai bergerak ke arah timur, akhirnya dihadap oleh Tentara Batalyon 406-407 dan Banteng Raiders yang jika dijumlahkan berjumlah 465 personil (*Wawasan* pada 15 Februari 1998: 1). Para personil itu diperintahkan langsung oleh H. Syamsudin Sagiman yang merupakan Bupati Brebes yang masih menjabat pada tahun 1998 (Wawancara dengan H. Syamsudin Sagiman pada 8 Maret 2021). Diperintahkannya para petugas untuk segera menghadang massa di Jembatan Cisanggarung yang menjadi batas antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Para petugas segera membentuk formasi pagar betis di Jembatan Cisanggarung. Massa yang tidak terkendali semakin marah untuk menerobos pagar betis yang dibuat oleh Batalyon 407. Sehingga, massa mulai marah dengan melemparkan benda apa saja demi menerobos pagar betis di Jembatan Cisanggarung (*Suara Merdeka* pada 14 Februari 1998: 16). Pagar betis itu bukanlah halangan berarti. Massa yang jumlahnya diperkirakan ribuan, mulai melewati sisi bawah jembatan dengan menyebrangi Sungai Cisanggarung untuk menuju Losari Timur (Wawancara dengan Ratna Yulia Patuh pada 13 Desember 2020). Pada titik ini merupakan titik dimana Losari Timur tertembus oleh amukan massa yang datang dari Losari Barat. Tertembusnya pagar betis di Losari Timur tersebut mengakibatkan rusaknya pertokoan dan Klenteng Hok Tek Bio.

Dalam kasus pengrusakan toko oleh massa yang datang dari Losari Barat, tidak ada kekerasan yang dilakukan kepada pemilik toko. Pemilik toko yang beretnis Tionghoa di Brebes sendiri memang sudah memprediksi akan

kejadian yang terjadi pada 13 Februari 1998 di Brebes tersebut berdasarkan kejadian sesuai hari sebelumnya di Jawa Barat.

Rusaknya pertokoan di Losari Timur memang tidak separah rusaknya pertokoan di Losari Barat. Namun, kejadian tersebut sudah membuat para pemilik toko trauma hingga banyak yang pindah dan meninggalkan kios mereka untuk dijual dan bahkan disewakan ke orang lain (Wawancara dengan Ratna Yulia Patuh pada 13 Desember 2020). Kekerasan terhadap penduduk etnis Tionghoa memang tidak ada sesuai dengan laporan media massa dan narasumber. Hanya kerugian dari pembakaran dan penjarahan saja yang dialami oleh para pemilik toko.

Sementara itu, toko-toko yang berada di sepanjang jalan Losari Timur juga dikategorikan sebagai toko “milik orang Jawa” tidak mengalami kerusakan dan penjarahan yang berarti. Disebutkan bahwa toko milik Haji Rokhidin dan Toko Sembako Susiyanti juga menjadi sasaran warga yang menjarah dengan mengambil sembako, uang, dan sejenis pompa air (Wawancara dengan Wijan pada 30 Januari 2021). Namun, berdasarkan kesaksian, agar toko-toko dan rumah orang Jawa tidak dijarah, harus diberi tulisan dengan sebutan “Orang Muslim” untuk menghindari pengrusakan dan penjarahan (Wawancara dengan Diding).

Jika melihat pola yang terjadi di kota lain di Jawa Barat, peristiwa yang terjadi memang memperlihatkan adanya sentimen terhadap etnis Tionghoa karena dianggap sebagai kambing hitam atas melambungnya harga barang dan kebutuhan pokok. Kejadian selanjutnya akan memperlihatkan wujud sentimen selain pengrusakan dan penjarahan toko, yaitu, pengrusakan Klenteng.

Kejadian tersebut terjadi ketika massa dari arah Losari Barat sudah berhasil menyeberangi Sungai Cisanggarung untuk merusak dan menjarah pertokoan. Hal yang menjadi sorotan di sini adalah tidak dirusakny toko atau rumah milik penduduk Jawa atau penduduk yang beragama Muslim. Selalu yang menjadi sasaran dari amukan massa tersebut adalah toko, rumah,

dan rumah ibadah dari penduduk Tionghoa di Losari.

Pengrusakan rumah ibadah ini menjadi salah satu kesimpulan adanya sentimen tersendiri terhadap etnis Tionghoa di Brebes. Pengrusakan tersebut disaksikan langsung oleh pengurus Klenteng Hok Tek Bio, yaitu Sugithon. Massa yang berencana merusak Klenteng Hok Tek Bio langsung memanjat dinding pagar dari Klenteng untuk memecahkan kaca dari Klenteng tersebut. Orang-orang yang memecahkan kaca Klenteng langsung mengalami pendarahan pada tangannya karena terkena serpihan kaca. Selain itu, serpihan kaca yang pecah juga mengenai kaki dari orang-orang yang akan merusak Klenteng. Sugithon menyebutkan bahwa, terhindarnya Klenteng Hok Tek Bio dari pembakaran adalah karena petugas dari Batalyon 407 yang segera datang untuk mengamankan lokasi (Wawancara dengan Sugithon pada 13 Desember 2020).

Salah satu saksi mata lain menyebutkan bahwa terhindarnya Klenteng dari kerusakan adalah karena Klenteng berada di sekitar pasar yang membuat warga Losari Timur juga ikut melindungi kawasan pasar sekaligus kawasan Klenteng (Wawancara dengan Wasnadi pada 16 Desember 2020).

Klenteng memang tidak sepenuhnya mengalami kerusakan. Namun, warga sekitar juga sudah menduga akan terjadinya pembakaran dan terlebih selalu terdengar teriakan untuk membakar apapun yang ada di hadapan massa. Jika memang terjadi keterlambatan datangnya petugas keamanan, maka sudah dapat dipastikan bahwa Klenteng Hok Tek Bio sudah habis terbakar (Wawancara dengan H. Syamsudin Sagiman pada 8 Maret 2021).

Peristiwa Pasca Kerusuhan

Mengganasnya massa yang ingin menerobos pagar betis yang dibuat oleh petugas membuat para petugas harus bertindak tegas kepada massa agar tidak semakin parah tindakan anarkisnya. Dalam laporan dari *Suara Merdeka*, disebutkan bahwa massa melakukan tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan dari para petugas dengan dibuktikan membawa kapak

untuk menyerang petugas (*Suara Merdeka* pada 15 Februari 1998: 1).

Dalam kondisi tersebut, petugas melakukan pelemparan gas air mata kepada kerumunan massa agar segera membubarkan diri. Untuk massa yang mengganas dengan kekerasan, petugas menggunakan peluru karet untuk segera menghentikan kekerasan tersebut. Akibat dari peluru karet yang ditembakkan oleh petugas, dua orang dilaporkan tewas, yaitu Tamin (22) yang merupakan warga Losari Lor dan Amran (24) warga Losari Timur. Sedangkan tujuh orang juga dinyatakan luka berat (*Suara Merdeka* pada 15 Februari 1998: 1).

Kerusuhan di Losari Timur yang hanya terjadi pada Jumat, 13 Februari 1998, sangat berdampak pada kondisi lalu lintas di Kabupaten Brebes. Lokasi Brebes sendiri merupakan kawasan jalur Pantai Utara yang menghubungkan seluruh lalu lintas Pulau Jawa. Dengan adanya kerusuhan di Losari Timur, Brebes, tentu saja sangat berdampak pada kondisi lalu lintas di Jalur Pantai Utara tersebut.

Angkutan seperti bus maupun kendaraan pribadi yang akan menuju ke Semarang maupun ke Jakarta sempat terhenti aktivitas lalu lintasnya saat kerusuhan dan penjarahan yang terjadi di Losari Timur. Kacaunya arus lalu lintas tersebut terjadi di jalur arteri pantai utara (pantura) antara Cirebon dan Brebes lumpuh tidak bergerak sejak pk1. 09.00 - 16.00 baru bisa bergerak dari arah timur ke barat maupun sebaliknya (*Suara Merdeka* pada 14 Februari 1998: 16).

Kendaraan pribadi yang tertahan membuat mereka sangat khawatir jika melintas akan membahayakan diri sendiri. Begitu juga yang dialami oleh angkutan seperti bus yang tertahan di terminal maupun jalan. Bahkan, calon penumpang yang akan menggunakan jasa-jasa bus, harus membatalkan jadwal keberangkatan mereka karena pasti sangat khawatirkan keselamatan diri sendiri.

Dampak dari aksi massa di Losari Timur yang berujung pada pengrusakan dan penjarahan tidak hanya melumpuhkan aktivitas di Brebes saja. Melainkan, seperti di wilayah Tegal juga terdampak dari kerusuhan yang berdampak pada kacaunya lalu lintas di Brebes. Seperti di terminal

Tegal yang memang kesehariannya sangat ramai dan disebut oleh *Suara Merdeka* sebagai “Terminal yang Tidak Tidur”, pada 13 Februari 1998 pukul 09.00 sudah terpantau tidak ada aktivitas pengangkutan penumpang untuk menuju ke arah Jakarta karena lalu lintas di Brebes sudah lumpuh. Alhasil, banyak calon penumpang telantar, hingga duduk dan bahkan tidur di sekitar terminal (*Suara Merdeka* pada 14 Februari 1998: 16.)

Selain itu, angkutan yang berada di wilayah Jawa Tengah lain juga tertahan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara. Sore hari pada 13 Februari 1998, mayoritas calon penumpang yang akan menuju ke Jakarta merasa sangat kecewa akibat adanya penundaan hingga pembatalan yang dilakukan oleh manajemen terminal. Calon penumpang yang merasa kecewa, akhirnya diberi pengertian oleh pihak terminal bahwa telah terjadi kemacetan parah di Kabupaten Brebes sebagai akibat dari kerusuhan di Losari (*Suara Merdeka* pada 14 Februari 1998: 16).

Lalu lintas baru benar-benar pulih ketika memasuki sore menjelang malam hari. Namun, jembatan Cisanggarung sendiri sudah dibuka pada pukul 16.00, tapi tidak ada sama sekali kendaraan yang melewati jembatan tersebut. Bahkan, hingga pada 14 Februari 1998 bus angkutan kota seperti “Deddy Jaya” masih terparkir di Desa Cimohong karena sopirnya tidak berangkat kerja. Hingga, Polres Brebes turun tangan untuk mengajak pengusaha angkutan umum untuk segera memulai kembali aktivitasnya yang dijamin oleh aparat. Para aparat tetap diperintahkan untuk bekerja di beberapa titik untuk mengamankan lalu lintas. Pada 13 Februari 1998 ini juga merupakan waktu dimana dilangsungkannya identifikasi pelaku dan korban dari kerusuhan di Losari Timur (*Suara Merdeka* pada 15 Februari 1998: 13)

Polres Brebes pada 14 Februari 1998 dengan cepat mampu mengidentifikasi 16 tersangka yang telah diamankan terkait dengan dalang dibalik kerusuhan yang terjadi di Losari Timur (*Wawasan* pada 15 Februari 1998: 1). Kemudian, pihak korban tewas dan terluka sudah diberikan santunan dan juga biaya

perawatan. Dua korban yang tewas diantaranya diberikan santunan berupa uang dan sembako. Mantan Bupati Brebes, H. Syamsudin Sagiman, menyebutkan bahwa santunan tersebut diberikan berupa uang dan beras untuk mengadakan *tahlilan* selama satu minggu yang juga sekaligus cerminan bagi warga agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi (Wawancara dengan H. Syamsudin Sagiman pada 8 Maret 2021). Selanjutnya, enam korban luka-luka diantaranya masih berusia 16-17 tahun yang langsung dibawa ke RS Brebes (*Suara Merdeka* pada 15 Februari 1998: 1).

Akibat adanya kerusuhan di Losari Timur, kekhawatiran di kalangan pejabat dan juga tokoh masyarakat memang sudah dirasakan ketika Losari Barat sudah berkecamuk. Wilayah Brebes sendiri merupakan pintu masuk massa yang dapat dikhawatirkan akan menuju wilayah Jawa Tengah lain, seperti Tegal, Pemalang, dan Pekalongan yang memiliki catatan historis mengenai gerakan massa yang mencekam (Lucas, 1989).

Benar saja, provokator kerusuhan mulai menjalar ke wilayah Timur Brebes, yaitu Tegal. Pada 14 Februari 1998, terjadi dua peristiwa sekaligus yang berkaitan dengan pembakaran. Peristiwa pertama adalah tindakan pembakaran yang ditujukan untuk membakar Pasar Margasari. Namun, kebakaran hanya menghanguskan gudang dan kandang ayam. Selain Pasar Margasari, peristiwa kedua mengenai pembakaran di Tegal juga terjadi terhadap bus milik salah satu perusahaan angkutan di Tegal. Bus yang dirusak tersebut adalah bus milik PO Kurnia yang habis terbakar dan rusak berat. Kemudian, polisi berhasil mengamankan dua pelaku pengrusakan bus tersebut (*Suara Merdeka*, 15 Februari 1998: 13).

Masih dalam serangkaian peristiwa yang sama. Pada 14 Februari di Pemalang, terdapat tradisi Haul Mubarak yang sudah dihadiri massa sejak pagi hari dan selesai pada 12.00. Setelah bubarnya massa Haul Mubarak tersebut, para pemilik toko di kawasan pertokoan Jalan Soedirman Timur mulai menutup tokonya dan terjadi pelemparan batu ke arah pertokoan di kawasan Jalan Soedirman Timur. Kejadian ini, hanya dialami oleh satu toko saja yang bernama

“Toko Andi” (*Suara Merdeka*, 15 Februari 1998: 13).

Sementara itu, di wilayah Pekalongan, H. Syamsudin Sagiman, menyebutkan bahwa pertokoan milik orang Tionghoa juga segera ditutup yang berkaitan dengan adanya kekhawatiran akan terjadi peristiwa serupa Losari Brebes di Pekalongan (Wawancara dengan H. Syamsudin Sagiman pada 8 Maret 2021).

Peristiwa yang bermula terjadi di Losari Timur Brebes tersebut, memang sudah hampir merembet ke wilayah timur Brebes lain seperti Tegal, Pemalang, dan Pekalongan. Namun, kesigapan pemerintah dan aparat mampu mengatasi semakin meluasnya kerusuhan di wilayah ujung barat Jawa Tengah ini. Penulis yang mewawancarai langsung Mantan Bupati Brebes tahun 1998, H. Syamsudin Sagiman, selalu mendapatkan pernyataan bahwa kerusuhan yang terjadi di Losari Timur memiliki dalang dibalik kerusuhan dan penjarahan.

Samzu dalam studinya menyebutkan bahwa kekerasan etnis Tionghoa dan terlebih terjadi pada tahun 1998 selalu dipicu oleh provokator yang menyebarkan berita miring. Adanya provokasi yang dilakukan oleh provokator untuk melakukan penjarahan juga terjadi di Losari Timur Brebes. Kerusuhan dan penjarahan di Losari memang bermula dari kerusuhan yang terjadi di Losari Barat, Cirebon. Adanya kerusuhan yang terjadi di Cirebon tersebut berhasil memancing massa untuk terus bergerak ke arah Losari Timur. Terlebih lagi tidak ada teknologi informasi dan komunikasi yang memadai untuk memastikan kebenaran informasi.

Mayjen TNI Mardiyanto yang diliput oleh *Suara Merdeka*, menyebutkan bahwa setelah terjadinya kerusuhan di Losari Timur, jajaran pemerintah dan aparat langsung melakukan himbauan kepada para pengusaha, pemilik toko, dan pedagang lain agar tidak memutuskan penetapan harga secara sepihak, seperti adanya kenaikan harga barang yang dilakukan secara fantastis karena dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat (*Suara Merdeka*, 16 Februari 1998: 15). Nada serupa juga dilontarkan oleh

anggota DPRD Jawa Tengah, H. Alip Pandoyo, yang selalu menyebutkan bahwa para pengusaha “nakal” yang sudah menaikkan harga barang akan ditindaklanjuti oleh aparat keamanan. Bukan hanya di kalangan pengusaha maupun pedagang, jajaran pemerintah langsung mengajak masyarakat untuk membentuk tim pengamanan swakarsa demi menghindari hal serupa di Losari Timur.

SIMPULAN

Pertama, relasi sosial antar etnis di Kabupaten Brebes menjadi sorotan dalam bagian ini. Relasi sosial antar etnis di Kabupaten Brebes terwujud dalam sentimen-sentimen antar etnis yang semakin merebak dan tidak dapat dikendalikan, terutama terjadi pada etnis Tionghoa di Brebes. Namun, hubungan antar etnis lain seperti etnis Arab dan India tidak serumit hubungan etnis Tionghoa dengan pribumi. Hal tersebut disebabkan oleh orang-orang Arab dan India dapat melebur bersama dengan penduduk pribumi seperti di wilayah Pekalongan, Brebes, dan Tegal. Berbeda dengan etnis Tionghoa yang sangat memiliki eksklusifitas tersendiri sehingga sentimen dari penduduk Indonesia terhadap etnis Tionghoa muncul. Pembatasan hak etnis Tionghoa akhirnya dibatasi oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan PP No. 14/1967 yang berisi tentang pelarangan kegiatan yang berbau Cina, baik dari segi keagamaan, kepercayaan, dan adat. Peraturan Pemerintah tersebut juga turut dikeluarkannya surat edaran No. 6/Peskab/6/67 yang menyatakan bahwa Etnis Tionghoa harus mengubah namanya menjadi nama yang berbau Indonesia.

Kedua, bagian ini akan menjawab mengenai permasalahan di Era Orde Baru yang menyebabkan konflik rasial di Kabupaten Brebes. Permasalahan tersebut mencakup naiknya harga-harga barang dan langkanya kebutuhan pokok sehari-hari bagi warga Brebes. Naiknya harga-harga barang tersebut seperti contoh, naiknya harga pakan untuk udang windu yang semula Rp. 3.800/kg menjadi Rp. 10.000/kg, harga minyak goreng yang semula Rp. 3.000/liter menjadi Rp. 5.500/liter, harga pakan ayam yang semula Rp.

40.000/sak langsung melejit naik hingga Rp. 96.000/sak, dan harga beras yang semula Rp. 950/kg menjadi Rp. 2.500/kg. Melambungnya harga-harga di Kabupaten yang ditemukan di berbagai sumber menunjukkan adanya ketidakpuasan dari masyarakat. Ketidakpuasan tersebut, menimbulkan permasalahan yang berujung pada kemarahan-kemarahan massa yang tidak puas akan kondisi demikian. Puncaknya, terjadi kerusuhan di Losari Timur (Brebes) yang diakibatkan oleh kumpulan massa yang berasal dari Losari Barat (Cirebon). Dalam kerusuhan tersebut, selalu terdengar nada-nada anti etnis Tionghoa berdasarkan penuturan narasumber. Namun, kerusuhan yang telanjur meluas, membuat massa tidak memandang toko yang dirusak dan dijarah milik etnis tertentu.

Ketiga, bagian ini akan membahas mengenai penyelesaian kerusuhan di Losari Timur sekaligus di tiga wilayah lain, seperti Tegal, Pemalang, dan Pekalongan. Penyelesaian kerusuhan dan penjarahan tersebut merupakan wujud koordinasi antara pemerintah dan aparat yang cepat mengatasi massa untuk masuk lebih dalam ke Losari Timur dan bahkan menghadang massa untuk membakar atau merusak Klenteng Hok Tek Bio. Penanganan kerusuhan dan penjarahan di Brebes, menunjukkan bahwa ada keberhasilan yang dicapai karena meminimalisir kerusuhan menyebar ke Tegal, Pemalang, dan Pekalongan. Selain adanya peran dari pemerintah dan aparat, peran yang dilakukan untuk mengatasi kerusuhan semakin menyebar adalah adanya peran dari tokoh masyarakat, ulama, dan masyarakat itu sendiri agar tidak terpancing isu yang dapat menggiring massa terkait permasalahan ekonomi di Brebes.

Setelah berakhirnya kerusuhan pada 13 Februari 1998 di Losari Timur, masyarakat Tionghoa Brebes yang semula berjumlah 61 jiwa, kini sudah menyusut hingga jumlahnya menjadi 13 jiwa saja. Mereka disebut sangat trauma pasca kejadian kerusuhan di Losari Timur tersebut sehingga memutuskan untuk pindah dari Kabupaten Brebes. Namun, sebagian dari mereka yang masih bertahan tetap melanjutkan kehidupannya, seperti layaknya Toko Jahit milik Ratna Yulia Patuh, Toko Sandal dan Sepatu

milik Nina Yulia Patuh, dan Toko elektronik Sinar Jaya milik Sugithon. Peristiwa tersebut sangat memberikan pesan serta kesan bahwa peristiwa tersebut tidak sepatutnya terulang di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarabi. 2010. Wacana dan Stigma Etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam *Jurnal An-Nilda*. Vol. 3, No. 1. Hlm. 55.
- Badan Pusat Statistik. 1999. *Brebes Dalam Angka*. Brebes: BPS Kabupaten Brebes.
- Dahana. 2014. Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia. Dalam *Jurnal Wacana*. Vo. 2, No. 1. Hlm 56.
- Gottschalk, Louis. 2008. "Mengerti Sejarah, edisi terjemahan Nugroho Notosusanto". Jakarta: UI Press.
- Husodo, Siswono Yudo. 1985. *Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)*. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.
- Irwandi dan Endah R. Chotim. 2017. Analisis Konflik antara Masyarakat, Pemerintah dan Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). Dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 7(2). Hlm. 25.
- Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulistyo. 2010. Permasalahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya. Dalam *Jurnal Demokrasi*. Vol. IX, No. 1, 2010. Hlm. 47.
- Lucas, E. Anton. 1989. *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Rvolusi*. Jakarta: PT pustaka Utama.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. 2012. *Sejarah Kabupaten Brebes*. Brebes: Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
- Sahlan. 2015. "Konflik antara Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus pada Eksplorasi Tambang di Keccamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Bara". Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumarto, Sudarno. 2009. "Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-Bukti Awal Desentralisasi di Indonesia". Makalah SMERU. Edisi Maret.

Sumber Koran dan Majalah

- Bahari* tanggal 8 Februari 1998.
- Suara Merdeka* pada 14 Februari 1998, hlm. 16.
- Wawasan* pada 15 Februari 1998, hlm. 1.
- Suara Merdeka* pada 15 Februari 1998, hlm. 1.

Suara Merdeka pada 16 Fenruari 1998, hlm. 15.

Sumber Wawancara

- Wijanarto pada 10 Oktober 2020
- Diding pada 13 Desember 2020.
- Nani Hendrawati pada 13 Desember 2020.
- Ratna Yulia Patuh pada 13 Desember 2020.
- Sugithon pada 13 Desember 2020.
- Wasnadi pada 16 Desember 2020.
- Adi Warsadi pada 1 Februari 2021.
- H. Syamsudin Sagiman pada 8 Maret 2021.